



RENCANA KERJA (RENJA)

2017

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No.198 Telp. 83143 Padang Panjang-27118

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka penyusunan Renja SKPD di dasarkan pada aspirasi masyarakat yang diakomodir melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang juga harus menyusun Rencana Kerja tersebut untuk periode 1 (satu) Tahun kedepan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Kota Padang Panjang.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ini menjadi Dasar Penyusunan Usulan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang

Padang Panjang, Maret 2016

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang



Dra. MAINI, MM

NIP. 196405051990032007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
LAPORAN OPERASIONAL.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
NERACA.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
CATATAN ATAS LAPORAN KAUANGAN.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	6
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS DUKCAPIL	7
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	11
BELUM OPTIMALNYA KUALITAS DAN KWANTITAS SDM APARATUR PETUGAS PELAYANAN DAN PERKANTORAN LAINNYA.....	12
2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	13
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	13
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA	14
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	15
BAB VI PENUTUP	16
LAMPIRAN.....	17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka penyusunan Renja SKPD di dasarkan pada aspirasi masyarakat yang diakomodir melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang juga harus menyusun Rencana Kerja tersebut untuk periode 1 (satu) Tahun kedepan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Kota Padang Panjang.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ini menjadi Dasar Penyusunan Usulan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2017 adalah :

- Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962).
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4247)
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).



- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1158 Tahun 2005 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578).
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Nomor Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan



Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737).

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah .
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006 - 2012.
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D3);
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E2)
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);



- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7) .
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.5)
- Peraturan Daerah Kota padang Panjang No. 15 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang, dan
- Peraturan Walikota Padang Panjang No 26 Tahun 2010 tentang uraian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tahun 2017 merupakan dokumen Perencanaan dalam jangka 1 (satu) tahun yang dijadikan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2017. Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah untuk menetapkan prioritas pembangunan tahun 2017 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi yang sebelumnya telah dituangkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tahun 2017 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN



PENCATATAN SIPIL TAHUN 2016

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Dukcapil
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III TUJUAN,SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB VII PENUTUP



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dapat digambarkan pada tabel berikut:



**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program (Akhir Tahun Renstra SKPD)	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun	Realisasi renja SKPD tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2015	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
1	10	01	01	01	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran					
1	10	01	01	01	Output : Tersedianya materi, kilat kusus tercatat	100%	100%	100%	100%	100%
1	10	01	01	02	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Output : Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telepon dan faksimile/internet	100%	100%	100%	100%
1	10	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Output : Terlaksananya pemeliharaan perawatan kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%
1	10	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Terlaksananya pembayaran honor pengelola Keuangan dan barang	100%	100%	100%	100%
1	10	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya peralatan kebersihan kantor	100%	100%	100%	100%
1	10	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Tersedianya alat tulis kantor	100%	100%	100%	100%
1	10	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%
1	10	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya komponen instalasi listrik dan bangunan	100%	100%	100%	100%
1	10	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Output : Tersedianya bahan bacaan dan perpustakaan	100%	100%	100%	100%
1	10	01	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	100%	100%	100%	100%
1	10	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Output : Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi	100%	100%	100%	100%
1	10	01	01	19	Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknis perkantora	Output : Tersedianya honor bagi pegawai non PNS	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
1	10	01	02		Outcome : -Penerapan ISO 9001 - Tersedianya biopori/ sumur resapan di gedung kantor - Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur					
1	10	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Output : Tersedianya kendaraan dinas (Roda dua 2 unit, Mobil Operasional 1 Unit, dan Mobil Pelayanan 1 unit)	100%	100%	100%	100%
1	10	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%	100%
1	10	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output : Terlaksananya perawatan gedung kantor	100%	100%	100%	90%
1	10	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Kantor	Output : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana	100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										
1	10	01	03		Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur					
1	10	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNS	100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										
1	10	01	05		Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM aparatur					
1	10	01	05	03	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Output : Meningkatnya pengetahuan aparatur	100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										
1	10	01	06		Outcome : - Meningkatnya penilaian evaluasi kinerja SKPD - Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LAKIP					
1	10	01	06	02	Penusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Output : Tersusunnya lap. Keuangan semesteran	100%	100%	100%	100%
1	10	01	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Output : Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran	100%	100%	100%	100%
1	10	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Output : Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
1	10	01	15		Outcome : - Penerapan ISO 9001 - Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat - Tertibnya Administrasi Kependudukan					
1	10	01	15	01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu	Output : Terlaksananya pelayanan SIAK terpadu	100%	100%	100%	100%
1	10	01	15	02	Pelatihan tenaga Pengelola SIAK	Output : Terlaksananya pelatihan tenaga pengelola SIAK (pencetakan KTP-el)	100%	100%	100%	100%

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	01	15	07	Penyediaan Informasi yang dapat di akses masyarakat	Output : Output : Tersedianya informasi administrasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat dokumen kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	10	01	15	11	Peningkatan SDM Aparatur	Output : Terlaksananya pelatihanpetugas register.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	10	01	15	12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Output : Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adm kependudukan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	10	01	15	14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output : Tertatanya adm kependudukan di kelurahan dan kecamatan,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	10	01	15	32	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Output : Terselenggaranya Koordinasi dengan aparat kecamatan dan Kelurahan se-Kota Padang Panjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	10	01	15	43	Penyusunan buku Daftar RT	Output : Terlaksananya tertib ADM Kependudukan yang dimulai dari tingkat RT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	10	01	15	44	Pemutakhiran Data Penduduk	Output : Akurasi data penduduk.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	10	01	15	45	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Output : Terlaksananya Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padang Panjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	10	01	15	46	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Output : Terlaksananya Pelayanan Langsung ke masing - masing kelurahan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	10	01	15	48	Penataan Arsip Vital dan aplikasi penatausahaan dokumen kependudukan dan Pencatatan	Output : Tersusunya dan tertatanya arsip dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	10	01	15	49	Percepatan Perekaman KTP-el dan peristiwa penting lainnya pada momen tertentu	Output : Terlaksananya perekaman e-ktip kpd seluruh masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%
1	10	01	15	50	Peningkatan Pelayanan Berstandarkan ISO 9001	Output : Terlaksananya pelayanan yang berstandarkan ISO	100%	100%					100%	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Dukcapil

Selama periode Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah berupaya untuk melaksanakan strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Gambaran mengenai perkembangan jumlah penduduk dan Kepala Keluarga di Kota Padang Panjang selama 3 (tiga) tahun terakhir (2013, 2014 dan 2015) sebagai berikut:

Tabel 2.1
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DI KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2013, 2014 DAN 2015

No	Kecamatan/ Kelurahan	2013				2014				2015			
		Penduduk			Jml KK	Penduduk			Jml KK	Penduduk			Jml KK
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
I	Pd Pj Timur	11,371	10,956	22,327	5,677	11,549	11,118	22,667	5,825	11,828	11,364	23,192	6,002
1	Ganting	1,320	1,252	2,572	630	1,341	1,280	2,621	649	1,425	1,354	2,779	691
2	Sigando	886	845	1,731	432	914	854	1,768	452	935	865	1,800	461
3	Ekor Lubuk	1,283	1,177	2,460	667	1,288	1,201	2,489	676	1,286	1,217	2,503	684
4	Ngalau	1,299	1,284	2,583	658	1,344	1,321	2,665	685	1,401	1,375	2,776	724
5	Guguk Malintang	3,073	3,043	6,116	1,511	3,106	3,089	6,195	1,554	3,158	3,113	6,271	1,585
6	Koto Panjang	2,108	1,984	4,092	1,025	2,140	1,989	4,129	1,046	2,167	2,042	4,209	1,070
7	Koto Katik	511	478	989	272	509	479	988	270	529	499	1,028	287
8	Tanah Pak Lambik	891	893	1,784	482	907	905	1,812	493	927	899	1,826	500
II	Pd Pj Timur	15,662	15,362	31,024	7,924	15,901	15,617	31,518	8,096	16,256	15,998	32,254	8,348
1	Bukit Surungan	1,186	1,179	2,365	587	1,245	1,199	2,444	614	1,276	1,235	2,511	632
2	Pasar Usang	1,971	1,951	3,922	1,025	1,976	2,003	3,979	1,040	1,978	1,997	3,975	1,042
3	Kampung Manggis	3,267	3,103	6,370	1,632	3,314	3,173	6,487	1,655	3,398	3,250	6,648	1,719
4	Silaing Bawah	2,620	2,679	5,299	1,317	2,651	2,700	5,351	1,364	2,785	2,801	5,586	1,428
5	Silaing Atas	1,246	1,170	2,416	646	1,266	1,198	2,464	657	1,296	1,256	2,552	684
6	Pasar Baru	765	754	1,519	393	783	758	1,541	400	795	778	1,573	409
7	Tanah Hitam	1,783	1,741	3,524	928	1,777	1,756	3,533	929	1,799	1,813	3,612	955
8	Balai-Balai	2,824	2,785	5,609	1,396	2,889	2,830	5,719	1,437	2,929	2,868	5,797	1,479
	JUMLAH	27,033	26,318	53,351	13,601	27,450	26,735	54,185	13,921	28,084	27,362	55,446	14,350

Dilihat dari table perkembangan penduduk Kota Padang Panjang tahun 2013, 2014 dan 2015 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Untuk perbandingan tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak 0,96% dan 0,97% untuk tahun 2014 dan 2015. Sedangkan untuk perbandingan tahun 2014 dan 2015 juga mengalami peningkatan jumlah KK dengan perbandingan 2013 dan 2014 sebanyak 0,97% dan 0,97% untuk tahun 2014 dan 2015.

Selanjutnya dilihat dalam hal kepemilikan KTP penduduk di Kota Padang Panjang 3 (tiga) tahun terakhir (2013,2014, dan 2015) dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
PERKEMBANGAN PENDUDUK WAJIB KTP DAN MEMILIKI KTP
KONDISI TAHUN 2013, 2014 DAN 2015

No	Kecamatan/ Kelurahan	2013			2014			2015		
		Wajib KTP	YANG MEMILIKI KTP	%	Wajib KTP	YANG MEMILIKI KTP	%	Wajib KTP	YANG MEMILIKI KTP	%
I	Pd Pj Timur	15,117	13,081	86.53	15,412	13,332	86.50	15,788	14,197	89.92
1	Ganting	1,737	1,492	85.90	1,779	1,511	84.94	1,867	1,630	87.31
2	Sigando	1,142	1,025	89.75	1,175	1,055	89.79	1,211	1,091	90.09
3	Ekor Lubuk	1,642	1,387	84.47	1,676	1,418	84.61	1,705	1,512	88.68
4	Ngalau	1,804	1,604	88.91	1,847	1,619	87.66	1,910	1,763	92.30
5	Guguk Malintang	4,146	3,503	84.49	4,224	3,596	85.13	4,248	3,781	89.01
6	Koto Panjang	2,704	2,330	86.17	2,746	2,358	85.87	2,840	2,563	90.25
7	Koto Katik	691	619	89.58	689	635	92.16	715	665	93.01
8	Tanah Pak Lambik	1,251	1,121	89.61	1,276	1,140	89.34	1,292	1,192	92.26
II	Pd Pj Timur	20,933	18,554	88.64	21,410	19,506	91.11	22,081	19,828	89.80
1	Bukit Surungan	1,586	1,372	86.51	1,645	1,464	89.00	1,720	1,512	87.91
2	Pasar Usang	2,630	2,336	88.82	2,699	2,436	90.26	2,707	2,474	91.39
3	Kampung Manggis	4,348	3,776	86.84	4,458	3,931	88.18	4,598	4,015	87.32
4	Silaing Bawah	3,564	3,283	92.12	3,644	3,454	94.79	3,831	3,513	91.70
5	Silaing Atas	1,652	1,441	87.23	1,687	1,553	92.06	1,764	1,558	88.32
6	Pasar Baru	978	860	87.93	986	914	92.70	1,015	900	88.67
7	Tanah Hitam	2,414	2,147	88.94	2,453	2,242	91.40	2,509	2,295	91.47
8	Balai-Balai	3,761	3,339	88.78	3,838	3,512	91.51	3,937	3,561	90.45
	JUMLAH	36,050	31,635	87.75	36,822	32,838	89.18	37,869	34,025	89.85

Dilihat dari perkembangan penduduk Kota Padang Panjang wajib KTP yang memiliki KTP tahun 2014 dibanding tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 1,43 % dan untuk tahun 2015 meningkat sebesar 0,67 %. Dari data diatas pada akhir tahun 2015 masih terdapat 10,15 % lagi penduduk wajib KTP Kota Padang Panjang yang belum mempunyai KTP. Gambaran kondisi ini tentunya akan menjadi perhatian pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendatang.

Berikutnya dilihat dalam hal kepemilikan Akte Kelahiran penduduk di Kota Padang Panjang 3 (tiga) tahun terakhir (2013, 2014 dan 2015) dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:



Tabel 2.3
Perkembangan penduduk memiliki akte kelahiran
Kondisi tahun 2013, 2014 dan 2015

No	Kecamatan/ Kelurahan	2013			2014			2015		
		Jumlah Penduduk	Yang Memiliki Akta	Jumlah	Jumlah Penduduk	Yang Memiliki Akta	Jumlah	Jumlah Penduduk	Yang Memiliki Akta	Jumlah
I	Pd Pj Timur	22,327	12,167	54.49	22,667	13,068	57.65	23,192	15,548	67.04
1	Ganting	2,572	1,317	51.21	2,621	1,538	58.68	2,779	1,851	66.61
2	Sigando	1,731	824	47.60	1,768	1,042	58.94	1,800	1,258	69.89
3	Ekor Lubuk	2,460	1,209	49.15	2,489	1,462	58.74	2,503	1,705	68.12
4	Ngalau	2,583	1,401	54.24	2,665	1,553	58.27	2,776	1,922	69.24
5	Guguk Malintang	6,116	3,680	60.17	6,195	3,520	56.82	6,271	4,191	66.83
6	Koto Panjang	4,092	2,187	53.45	4,129	2,309	55.92	4,209	2,760	65.57
7	Koto Katik	989	461	46.61	988	518	52.43	1,028	609	59.24
8	Tanah Pak Lambik	1,784	1,088	60.99	1,812	1,126	62.14	1,826	1,252	68.57
II	Pd Pj Timur	31,024	17,994	58.00	31,518	18,418	58.44	32,254	21,656	67.14
1	Bukit Surungan	2,365	1,250	52.85	2,444	1,340	54.83	2,511	1,622	64.60
2	Pasar Usang	3,922	2,213	56.43	3,979	2,460	61.82	3,975	2,855	71.82
3	Kampung Manggis	6,370	3,580	56.20	6,487	3,595	55.42	6,648	4,322	65.01
4	Silaing Bawah	5,299	3,326	62.77	5,351	3,213	60.04	5,586	3,890	69.64
5	Silaing Atas	2,416	1,362	56.37	2,464	1,552	62.99	2,552	1,888	73.98
6	Pasar Baru	1,519	892	58.72	1,541	842	54.64	1,573	1,042	66.24
7	Tanah Hitam	3,524	1,972	55.96	3,533	2,182	61.76	3,612	2,446	67.72
8	Balai-Balai	5,609	3,399	60.60	5,719	3,234	56.55	5,797	3,591	61.95
JUMLAH		53,351	30,161	56.53	54,185	31,486	58.11	55,446	37,204	67.10

Dilihat dari perkembangan penduduk Kota Padang Panjang yang memiliki Akte Kelahiran tahun 2014 dibanding tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 1,58 % dan untuk tahun 2014 meningkat sebesar 8,99 %. Dari data diatas pada akhir tahun 2014 masih terdapat 32,9% lagi penduduk Kota Padang Panjang yang belum mempunyai Akte Kelahiran. Gambaran kondisi ini tentunya akan menjadi perhatian pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendatang.

Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendaftaran Penduduk

Beberapa kinerja pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemahaman aparatur pengelola administrasi kependudukan dalam proses penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sosialisasi Kebijakan Kependudukan kepada aparatur;



- b. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam proses pengurusan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sosialisasi Kebijakan Kependudukan kepada masyarakat;
- c. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan di Kota Padang Panjang melalui monitoring pelaksanaan administrasi kependudukan ke Dinas/Instansi serta Kelurahan se-Kota Padang Panjang); dan
- d. Meningkatnya informasi pendaftaran penduduk pada masyarakat melalui ketersediaan brosur pengurusan KTP dan Surat Keterangan Pindah Datang.

2. Dibidang Pencatatan Sipil

Beberapa kinerja pelayanan Bidang Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemahaman aparatur pengelola administrasi pencatatan sipil dalam proses penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil kepada aparatur;
- b. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam proses pengurusan dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sosialisasi Kebijakan pencatatan sipil kepada masyarakat;
- c. Meningkatnya tertib administrasi pencatatan sipil di Kota Padang Panjang melalui monitoring pelaksanaan administrasi pencatatan sipil ke Dinas/Instansi serta Kelurahan se-Kota Padang Panjang);
- d. Meningkatnya informasi pencatatan sipil pada masyarakat melalui ketersediaan brosur pencatatan sipil dan papan informasi pelayanan akta catatan sipil;
- e. Telah Diterbitkannya Akta Catatan Sipil sebanyak 5.431 akta, Akte Kelahiran sebanyak 821 buah, Akte Kedua sebanyak 196 buah, Akte kematian sebanyak 2 buah, Akte perkawinan sebanyak 5 buah dan Catatan Pengesahan Anak 2 buah.

3. Dibidang Informasi dan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Beberapa kinerja pelayanan Bidang Informasi dan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, perawatan peralatan SIAK serta terupdatenya data dan program SIAK yang mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Tertatanya Arsip Vital Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan se Kota Padang Panjang dalam bentuk file data per keluarga yang disusun menurut RT, Kelurahan dan Kecamatan;



- c. Meningkatnya pemahaman aparatur pengelola SIAK melalui Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK baik dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan maupun aparatur kelurahan;
- d. Meningkatnya pemahaman Ketua RT dan perangkat RT pada data base kependudukan melalui sosialisasi data base kependudukan kepada petugas RT se Kota Padang Panjang;
- e. Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat pada pembuatan e-KTP melalui Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan.
- f. Tersedianya Database Kependudukan Kota Padang Panjang berupa buku data dan informasi kependudukan yang datanya dapat dipergunakan oleh Dinas/Instansi serta para peneliti lainnya melalui pemutahiran data penduduk;
- g. tersedianya data penduduk dan data pemilih untuk pemilihan Gubernur 2015 dan Walikota Tahun 2013 serta pemilihan DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kota dan DPD Tahun 2014 yaitu DAK-4 dan DAK-2; dan
- h. Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara umum kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi nya adalah :

- a. Telah dilakukan perekaman e-KTP pada penduduk Kota Padang Panjang sebanyak 29.968 orang (101,81%) dari target wajib KTP sebanyak 29.434 orang dan telah diterima e-KTP dari Pemerintah Pusat sebanyak 28.684 (95,7%) dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman sebanyak 29.968 orang (Kondisi s/d 31 Desember 2012); dan
- b. Terlaksananya Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui ketersedianya blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan blanko pencatatan sipil.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang panjang yang menjadi isi-isu penting adalah sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);



2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
3. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan penataan dokumen kependudukan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur petugas Pelayanan dan perkantoran lainnya

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak terdapat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat untuk dikerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tahun 2016 melalui usulan Musrenbang kelurahan



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Didalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Isu strategis pada aspek pemerintahan umum adalah terkait dengan masalah kependudukan. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 232,4 juta jiwa pada tahun 2009, kebijakan penataan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional. Upaya penataan administrasi kependudukan difokuskan pada penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang didukung oleh empat subsistem berupa pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, dan pendayagunaan data secara konsekuen, terpadu dan berkelanjutan dari tingkat nasional sampai daerah. Namun demikian, upaya penataan administrasi kependudukan pada beberapa tahun terakhir masih mengalami berbagai kendala, terkait dengan *data base* kependudukan, penegakan regulasi, dan dukungan SDM. Untuk itu tantangan kedepan yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut adalah diarahkan pada pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal secara nasional pada tahun 2011, dengan dukungan teknologi informasi pengolahan data yang terintegrasi.

Adapun misi dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri salah satunya adalah Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dengan salah satu tujuannya adalah terciptanya tertib adm kependudukan. Sedangkan sasaran renstra kemendagri dibidang kependudukan adalah :

- Tertib database kependudukan dan pelayanan kependudukan;
- Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan; dan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

Dari Telaahan atau analisis Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Propinsi Sumatera Barat dihubungkan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pencapaian renstra dimaksud.

Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah:

1. Adanya dukungan pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; dan



3. Data base dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dijadikan sebagai data nasional dan akan diintegrasikan dengan lembaga lain.
4. Dukungan dana APBN untuk pelaksanaan pelayanan kependudukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah:

1. Masih kurangnya kompetensi dan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan persyaratan dan tuntutan pekerjaan.
2. Adanya keterbatasan anggaran SKPD untuk melaksanakan kegiatan skala menengah keatas karena maksimal pagu anggaran yang telah ditetapkan.
3. Masih kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dalam pemanfaatan database hasil pelayanan SIAK

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan pelaksanaan dan realisasi pertahun dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Meningkatkan tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan
4. Mengembangkan pusat data kependudukan (database kependudukan) melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Adapun sasaran dari Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan pelaksanaan dan realisasi pertahun dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Terwujudnya tertib dokumen kependudukan melalui pelayanan administrasi kependudukan dengan metode stelsel aktif
2. Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dalam penataan Administrasi Kependudukan
4. Terwujudnya pengembangan database Kependudukan melalui SIAK
5. Terlaksananya monitoring evaluasi pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil setiap triwulan.
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berstandar ISO 9001



3.3. Program dan Kegiatan



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 ini juga berdasarkan pada rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang untuk tahun 2013 – 2018 yang berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang, usulan dan prioritas pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan dengan mempedomani tema dan prioritas pembangunan tahun 2016 di Kota Padang Panjang.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2016 menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 2014 serta prediksi Tahun 2017 serta rencana pembangunan, rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tahun 2016



LAMPIRAN



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
TABEL. 2.4**

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	10 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi umum perkantoran			697,570,000			887,050,000	
1	10 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Tersedianya materai , kilat kusus tercatat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Materai 3000 dan 6000 sebanyak 800 lembar dan belanja paket/pengiriman (1 tahun)	4,000,000	APBD	Program Rutin	Materai 3000 dan 6000 sebanyak 850 lembar	4,000,000
1	10 01 01 02	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Output : Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telepon dan faksimile/internet	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	90,000,000	APBD		Pembayaran rekening listrik, air dan telepon/internet selama 12 bulan	46,000,000
1	10 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Output : Terlaksananya pemeliharaan perawatan kendaraan dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	144,400,000	APBD		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (3 Unit) dan Roda 2 (8 unit)	179,400,000
1	10 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Terlaksananya pembayaran honor pengelola Keuangan dan barang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	90,000,000	APBD		Tersedianya Honorarium bagi PA, KPA, PPK, Sekretariat PPK dan Pembantu Bendahara selama 1 tahun	134,400,000
1	10 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	114,450,000	APBD		Tersedianya Honorarium bagi petugas kebersihan (2 orang) dan tersedianya alat-alat kebersihan selama 1 tahun	165,000,000
1	10 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	50,000,000	APBD		Kertas HVS 800 Rim, tinta komputer 280 botol, hecter 20 kotak, map gungyu 300 buah dan alat tulis lainnya	90,000,000
1	10 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	35,000,000	APBD		Cetak formulir kependudukan dan capil 250.000 lembar blangko, amplop 25 kotak, kwitansi bendahara 35.000 lembar, Map Dinas 5000 lembar, dll	43,000,000
1	10 01 01 12	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya komponen instalasi listrik dan bangunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	10,000,000	APBD		Alat-alat listrik spt lampu, kabel, kabel raun, barerai, dll	12,000,000
1	10 01 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	9,720,000	APBD		Rapat rutin 55 x 35 orang dan makan minum pada kegiatan-kegiatan	13,250,000
1	10 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Output : Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	150,000,000	APBD		12 kali perjalanan luar daerah dan 36 kali perjalanan dalam daerah	200,000,000
1	10 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Outcome : -Penerapan ISO 9001 - Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			128,000,000				220,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	perlengkapan gedung kantor berupa: Kursi Tamu, Laptop (2 unit), Karpet, Printer (4 unit), Filling kabinet (5 bh)	75,000,000	APBD		Lemari arsip 2 bh, meja biro 2 buah, meja 1/2 biro 4 bh	150,000,000
1	10	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output : Terlaksananya perawatan gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rehab Gedung/Kantor	35,000,000	APBD		rehab sedang kantor	50,000,000
1	10	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Kantor	Output : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemeliharaan 2 buah genset, 3 unit AC, 1 buah server dan 16 unit komputer, Laptop 11 unit	18,000,000	APBD		Pemeliharaan 2 buah genset, 1 unit AC, 1 buah server dan 15 unit komputer	20,000,000
1	10	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur			22,250,000				33,035,000
1	10	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNS	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pakaian dinas 45 stel	22,250,000	APBD		Pakaian dinas 35 stel dan pakaian olah raga 35 stel	33,035,000
1	10	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM aparatur			20,000,000				40,000,000
1	10	01	05	03	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Output : Meningkatnya pengetahuan aparatur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 tahun dengan 9 ok	20,000,000	APBD		1 tahun dengan 9 ok	40,000,000
1	10	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Outcome : - Meningkatnya penilaian evaluasi kinerja SKPD - Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LAKIP			326,000				244,500
1	10	01	06	01	Penusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output : - tersusun laporan bulanan kegiatan SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 laporan	81,500			12 laporan	81,500
1	10	01	06	02	Penusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Output : Tersusunnya lap. Keuangan semesteran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 laporan	81,500	APBD		2 laporan	81,500
1	10	01	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Output : Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 laporan	81,500	APBD		1 laporan	81,500
1	10	01	06	04	Penusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Output : Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 laporan	81,500	APBD		1 laporan dan honor Tim	81,500
1	10	01	15		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Outcome : - Penerapan ISO 9001 - Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat - Tertibnya Administrasi Kependudukan			734,157,500				818,725,000
1	10	01	15	01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu	Output : Tertatanya Administrasi dan database Kependudukan dan Cakil di Kota Padang Panjang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16 Kelurahan dan 2 kecamatan se Kota Padang Panjang	191,025,000	APBD		16 Kelurahan dan 2 kecamatan se Kota Padang Panjang	191,025,000
1	10	01	15	05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Output : Terselenggaranya Koordinasi dengan aparat kecamatan dan Kelurahan se-Kota Padang Panjang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aparatur 16 Kelurahan dan 2 Kecamatan dan Rapat Forum Dukcapil se-Sumbar	30,087,500	APBD		Aparatur 16 Kelurahan dan 2 Kecamatan	22,000,000
1	10	01	15	07	Publikasi dan sosialisasi Informasi, dokumentasi Kependudukan dan pencatatan sipil	Output : Terlaksananya publikasi, sosialisasi informasi dokumen kependudukan dan pencakil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Media elektronik 3, non elektornik 4, sosialisasi 100 orang	67,395,000	-		Masyarakat Kota Padang Panjang	68,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	01	15	13	Monitoring, evaluasi, validasi dan pemutakhiran data kependudukan	Output : Terlaksananya monev, dan validasi data kependudukan ke kelurahan dan kecamatan,	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16 Kelurahan dan 2 kecamatan se Kota Padang Panjang	132,700,000	APBD		16 Kelurahan dan 2 kecamatan se Kota Padang Panjang	132,700,000
1	10	01	15	14	Percepatan Perekaman e-KTP & dan peristiwa penting lainnya pada momen tertentu	Output : Terlaksananya perekaman e-ktp kpd seluruh masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16 Kelurahan dan 2 kecamatan se Kota Padang Panjang, Sekolah tingkat SLTA	50,000,000	APBD		16 Kelurahan dan 2 kecamatan se Kota Padang Panjang	90,000,000
1	10	01	15	16	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Output : Terlaksananya Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padang Panjang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60 Buku Profil kependudukan	22,950,000	APBD		80 Buku Profil kependudukan	35,000,000
1	10	01	15	17	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	Output : Terlaksananya pelayanan dokumen pembuatan akte pencatatan sipil bagi warga kelurahan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16 Kelurahan dan 2 kecamatan se Kota Padang Panjang	70,000,000	APBD		16 Kelurahan dan 2 kecamatan se Kota Padang Panjang	130,000,000
1	10	01	15	18	Sertifikasi Sistem amnajemen Mutu Berstandar ISO 9001-2015	Output : Terlaksananya pelayanan yang berstandarkan ISO, surveilent, dan pembimbingan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	terlaksana monev dan pembinaan berstandar ISO dan tindak lanjutnya	140,000,000	APBD		Tindak lanjut setelah penilaian ISO	150,000,000
1	10	01	15		Revisi Perda No.17 Tahun 2009	Output : Terlaksananya perubahan peraturan daerah No. 17 Tahun 2009	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perubahan Perda	30,000,000	APBD			
						Jumlah			1,602,303,500				1,180,329,500

Padang Panjang, Maret 2016
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dra. MAINI, MM
NIP. 19640505 199003 2 007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Prog/Kegiatan Perioritas 2

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	10	01	01											
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran			10,600,000				10,600,000					
1	10	01	01	20	Premi Tenaga kerja dan Kesehatan Masyarakat	Output : Tersedianya dana asuransi kesehatan pegawai non PNS	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	10,600,000	APBD			Asuransi kesehatan untuk 5 orang	10,600,000
1	10	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Outcome : -Penerapan ISO 9001 - Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur			150,000,000					150,000,000
1	10	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	perlengkapan gedung kantor berupa: Genset, AC, Server SIAK, Komputer	150,000,000	APBD			Lemari arsip 2 bh, meja biro 2 buah, meja 1/2 biro 4 bh	150,000,000